



BKPSDM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

*LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh **stakeholder** yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (**performance improvement**). Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.*

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 19 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. RAKHMADI, S.Sos.



IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban unit organisasi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan yang termuat dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana strategis. Berdasarkan dokumen renstra, sasaran BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan Indikator Kinerja Utama, yaitu sebagai berikut : **“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah”**

Dalam Perjanjian Kinerja 2023 terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama tambahan yaitu :

1. Meningkatkan Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan Fisik dan Keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerah;
12. Melaksanakan Reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
14. Melaksanakan pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK; dan
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah.

Ringkasan capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% tase
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Indeks	82	84,54	103,10%
2	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Indeks Sistem Merit	Nilai	250	215	86,00%
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti	Jumlah	3	2	66,67%
4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00%

5	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100,00%
6	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100,00%
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100,00%
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	77,4	129,00%
8	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100,00	100,00%
9	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100,00%
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100,00%
11	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100	96,09	96,09%
		Persentase Realisasi Keuangan	Persen	100	89,63	89,63%
12	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerah	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100,00%
13	Melaksanakan Reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100,00%
14	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim Budaya Kerja	Kegiatan	4	4	100,00%
15	Melaksanakan pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100,00%
16	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00%
17	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100	70,95	70,95%

18	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja						97,07%

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 sebesar **97,07%**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **“SANGAT TINGGI”**.

The page features abstract orange geometric shapes in the corners. In the top right, there are overlapping triangles and a thin diagonal line. In the bottom left, there are similar overlapping shapes and a thin diagonal line. The central text is in a bold, black, serif font.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tupoksi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	4
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.2 Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Capaian Kinerja.....	19
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	48
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Perbaikan Kedepan.....	50
LAMPIRAN	
1. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2023;	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023;	
3. Nota Dinas Nomor : P-11/BKPSDM/000.7.2.6/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023;	
4. Nota Dinas Nomor : P-17/BKPSDM/000.7.2.10/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023;	
5. Nota Dinas Nomor : P-18/BKPSDM/000.7.2.10/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023; dan	

6. Nota Dinas Nomor : P-19/BKPSDM/000.7.2.10/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023

The page features abstract orange geometric shapes in the corners. In the top right, there are overlapping triangles and a thin diagonal line. In the bottom left, there are similar overlapping shapes and a thin diagonal line. The central text is in a bold, black, serif font.

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Permasalahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4
1.2 Keadaan Pegawai BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara per 31 Desember 2023	9
2.1 Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.3 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
2.5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2023	17
3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	21
3.3 Hasil Survei Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM ..	23
3.4 Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat	24
3.5 Realisasi Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM Tahun 2018-2023	26
3.6 Daftar Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Belum Selesai Ditindak Lanjuti	28
3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	37
3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	40
3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat	41
3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
3.11 Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023	43

3.12 Indikator Kinerja Program Kepegawaian Daerah Tahun 2023	45
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun	
Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis.....	47
3.13 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023	48
3.14 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya	
(2022)	48

The page features a light cream background with abstract orange geometric shapes in the corners. In the top right, there are overlapping orange triangles and a thin white line. In the bottom left, there are similar orange shapes and a thin white line.

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8
2 Komposisi ASN berdasarkan status kepegawaian.....	10
3 Komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin	11
4 Perkembangan Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM Tahun 2018 s/d Tahun 2023	27
5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat.....	41

The page features abstract orange geometric shapes in the corners. In the top right, there are overlapping orange triangles and a thin white line. In the bottom left, there are similar orange shapes, including a triangle and a parallelogram, with a thin white line running diagonally.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis

yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;

2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Mutasi dan Promosi membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan

Permasalahan pelayanan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Permasalahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Profesionalitas	Belum optimalnya penilaian kinerja	Pengukuran kinerja belum memenuhi kaidah penilaian kinerja. Penilaian

ASN Kutai Kartanegara	dan pembinaan disiplin ASN	SKP dilakukan hanya sebatas formalitas untuk memenuhi berbagai persyaratan administrasi kepegawaian
		Pejabat penilai kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya memahami tata cara melakukan penilaian kinerja secara obyektif
		Belum optimalnya penerapan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
		Pelaksanaan reward dan punishment belum optimal
	Belum optimalnya data dan informasi kepegawaian	SIMPEG belum secara konsisten diupdate oleh Perangkat Daerah dan belum terintegrasi dengan SAPK
	Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian	Penyelesaian layanan dokumen kepegawaian yang belum sesuai SOP
		Penyampaian berkas dari Perangkat Daerah terlambat
		Belum sinkronnya data PNS dengan data SAPK
	Belum optimalnya pengembangan kompetensi PNS	Program pengembangan kompetensi belum sepenuhnya didasarkan pada hasil analisa kebutuhan pengembangan kompetensi
		Belum disusunnya kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan sebagai panduan pengembangan kompetensi
		Pemilihan peserta pengembangan kompetensi, belum dibuatkan standar dan kriteria calon peserta pengembangan kompetensi
		Belum semua PNS mengikuti program pengembangan kompetensi dengan jumlah minimum 20 JP pertahun

1.4.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka isu strategis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai untuk menentukan formasi dan penataan pegawai pada unit organisasi;
- b. Belum maksimalnya pengelolaan informasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian yang belum cepat dan tepat;
- d. Optimalisasi analisis pengembangan karier dan promosi serta mutasi sebagai panduan / kejelasan jenjang karir ASN;
- e. Optimalisasi Peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan peningkatan kompetensi ASN;
- f. Belum optimalnya Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN;
- g. Kesenjangan Kompetensi;
- h. Belum adanya pola penilaian kinerja yang didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu, tingkat unit dan organisasi yang jelas (target, sasaran, hasil dan manfaat serta perilaku dari ASN secara terukur, akuntabel dan transparan);
- i. Belum optimalnya pemberian reward dan punishment;
- j. Penanganan penegakkan disiplin pegawai belum optimal karena membutuhkan komitmen dari seluruh perangkat daerah dalam melaporkan pelanggaran disiplin di tempat kerja masing-masing;
- k. Peningkatan kompetensi pegawai BKPSDM; dan
- l. Sarana dan prasarana BKPSDM yang belum representatif.

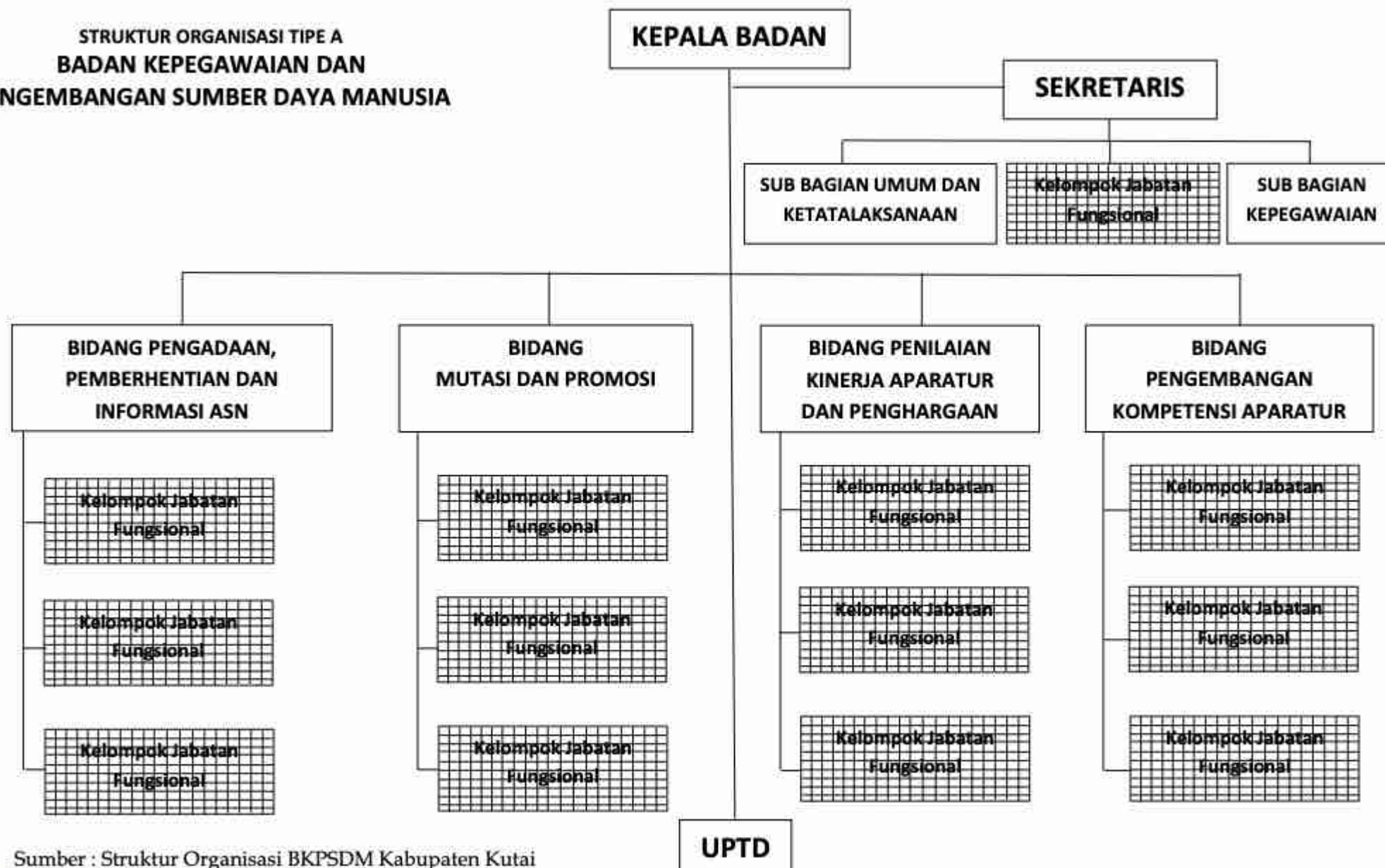
1.5 Uraian Singkat Organisasi

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi 3 (tiga) Kepala

Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 14 (empat belas) pejabat fungsional, 56 (lima puluh enam) Pelaksana dan 32 THL sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara

**STRUKTUR ORGANISASI TIPE A
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



Sumber : Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kutai
Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2021

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh 76 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 32 orang Non Aparatur Sipil Negara. Data mengenai keadaan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
KEADAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PER DESEMBER 2021

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	
	PNS		
1.	S3	1	Orang
2.	S2	3	Orang
3.	S1	43	Orang
4.	D-IV	1	Orang
5.	SLTA	27	Orang
6.	SLTP	1	Orang
	Sub Total	76	Orang
	Non ASN/THL		
7.	S1	21	Orang
8.	SLTA	10	Orang
9.	SLTP	1	Orang
	Sub Total	32	Orang
	Total	108	Orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah	
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	Orang
2.	Pembina (IV/a)	2	Orang
3.	Penata Tingkat I (III/d)	17	Orang

4.	Penata (III/c)	4	Orang
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	14	Orang
6.	Penata Muda (III/a)	14	Orang
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	19	Orang
8.	Pengatur (II/c)	3	Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	Orang
10.	Juru Tingkat I (I/d)	1	Orang
	Sub Total	76	Orang
11	THL	32	Orang
	Total	108	Orang

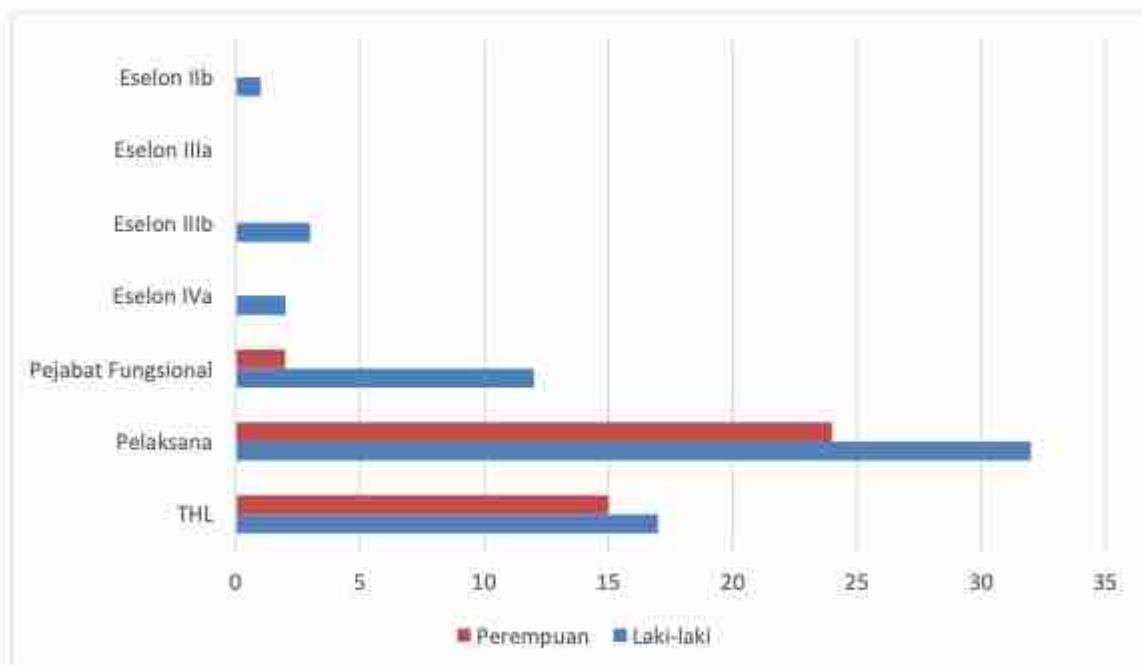
3. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	
	- Eselon II.b	1 Orang
	- Eselon III.a	0 Orang
	- Eselon III.b	3 Orang
	- Eselon IV.a	2 Orang
2	Fungsional Tertentu	14 Orang
3	Fungsional Umum	56 Orang
4	THL	32 Orang
	Total	108 Orang

Gambar 2 Komposisi ASN berdasarkan status kepegawaian



Gambar 3 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin





BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;

3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Misi ke-1 (satu) yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan manajemen kinerja BKPSDM; dan
2. Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan analisis kebutuhan.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Penguatan manajemen kinerja BKPSDM	1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BKPSDM 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara efektif, efisien dan akuntabel 3. Peningkatan kapasitas SDM BKPSDM 4. Peningkatan kualitas tata kelola arsip BKPSDM 5. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap 6. Peningkatan kualitas layanan dokumen surat menyurat, jasa internet dan THL 7. Peningkatan kualitas analisis kebutuhan pegawai, data dan informasi kepegawaian 8. Pelaksanaan promosi PNS dalam jabatan sesuai kebutuhan organisasi dan pengembangan karir 9. Peningkatan kapasitas ASN dan fasilitasi tugas belajar/ijin belajar 10. Pelaksanaan penilaian kinerja ASN dan pembinaan disiplin ASN
2	Penyelenggaraan pengembangan ASN berdasarkan analisis kebutuhan	Pengembangan kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Indeks	82	Survey kepuasan ASN terhadap layanan BKPSDM
Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Indeks Sistem Merit	Nilai	250	Hasil Evaluasi KASN
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah	3	Laporan Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
(BPK)/Inspektorat Daerah				
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	Laporan BPKAD
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	Laporan Bagian Organisasi
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	Laporan Inspektorat
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Hasil Evaluasi
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	Laporan Bappeda
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	Laporan BRIDA
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	Laporan BPKAD
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100	Laporan e-Pantau
	Persentase Realisasi Keuangan	Persen	100	LRA FMIS
Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerah	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	Laporan Inspektorat
Melaksanakan Reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim Budaya Kerja	Kegiatan	4	
Melaksanakan pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	Jumlah JP pada sertifikat pengembangan kompetensi
Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	Aplikasi Beppadah
Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100	Hasil Evaluasi Inspektorat
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal	Target 2023	Target Akhir Renstra 2026
1	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Indeks	76,62	82	90
2	Indeks Sistem Merit	Nilai	n/a	250	
3	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah	n/a	3	
4	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	n/a	100	
5	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	n/a	100	
6	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	n/a	100	
7	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	n/a	100	
8	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	n/a	Baik (B) 60-70	
9	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	n/a	100	
10	Jumlah Inovasi	Jumlah	n/a	1	
11	Capaian Output Kegiatan	Persen	n/a	100	
12	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	n/a	100	
13	Persentase Realisasi Keuangan	Persen	n/a	100	
14	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	n/a	2	

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal	Target 2023	Target Akhir Renstra 2026
15	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	n/a	1	
16	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim Budaya Kerja	Kegiatan	n/a	4	
17	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	n/a	100	
18	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	n/a	100	
19	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	n/a	100	
20	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	n/a	100	

The page features abstract orange geometric shapes in the corners. In the top right, there are overlapping orange triangles and a thin white line. In the bottom left, there are similar orange shapes and a thin white line.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 sebesar 100,62%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **"SANGAT TINGGI"**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Indeks	82	84,54	103,10%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Indeks Sistem Merit	Nilai	250	215	86,00%	Tinggi
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti	Jumlah	3	2	66,67%	Sedang
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	77,4	129,00%	Sangat Tinggi
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi

Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100	96,09	96,09%	Sangat Tinggi
	Persentase Realisasi Keuangan	Persen	100	89,63	89,63%	Tinggi
Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerah	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
Melaksanakan Reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim Budaya Kerja	Kegiatan	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
Melaksanakan pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100	70,95	70,95%	Sedang
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100,00%	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Capaian Indikator Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM

Target kinerja indikator "Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM" sebesar 82,00 dengan realisasi 84,54 atau capaian kinerja sebesar 103,10% berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Nilai IKM/Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$N = \text{Bobot Nilai Per Unsur}$

Untuk memperoleh nilai SKM unit unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dapat dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 diperoleh dari survei terhadap 821 responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparat BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2023. Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

Hasil Survey Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Prosedur Pelayanan	3,31
U2	Persyaratan Pelayanan	3,25
U3	Waktu Pelayanan	3,15
U4	Biaya/Tarif	3,84
U5	Produk Layanan	3,23
U6	Kompetensi Pelaksana	3,29

U7	Perilaku Pelaksana	3,33
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,79
U9	Sarana dan Prasarana	3,24
	Nilai Rata-rata	3,38
	IKM Unit Pelayanan	84,54

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Nilai IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.4

Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Nilai IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 84,54 menunjukkan nilai interval pada posisi 3,0644 – 3,532. Sesuai dengan tabel di atas maka Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah “B” atau berpredikat “**Baik**”.

Dilihat dari nilai IKM yang diperoleh tersebut, target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dicapai dengan maksimal, adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut antara lain :

1. Tersedianya aplikasi layanan kepegawaian yang memudahkan pemberian layanan kepada seluruh ASN
2. Tersedianya aplikasi survei Kukar yang memudahkan pelaksanaan survei
3. Pengembangan kompetensi ASN BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
4. Komitmen seluruh ASN BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh ASN.

Meskipun target kinerja Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM sudah tercapai, tetapi masih terdapat permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Waktu Penyelesaian Layanan masih dirasakan lambat oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
 - a. Belum ada Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis layanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Belum melakukan evaluasi dan revisi terhadap SOP, karena terdapat perubahan aturan terkait administrasi kepegawaian.
 - c. Petugas layanan belum memiliki keterampilan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.
2. Kesesuaian Produk Layanan masih dirasakan rendah oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Database ASN belum terintegrasi dengan sistem pelayanan.
 - b. Ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen layanan kepegawaian masih lemah.
3. Kualitas Sarana dan Prasarana yang dianggap kurang memadai oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain disebabkan :
 - a. Posisi layanan berada di lantai 3, dan fasilitas *lift* kurang maksimal (sering mengalami kendala teknis) sehingga mengurangi tingkat kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
 - b. Belum adanya ruang tunggu yang representati bagi ASN.

Berdasarkan kendala tersebut di atas maka rekomendasi pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

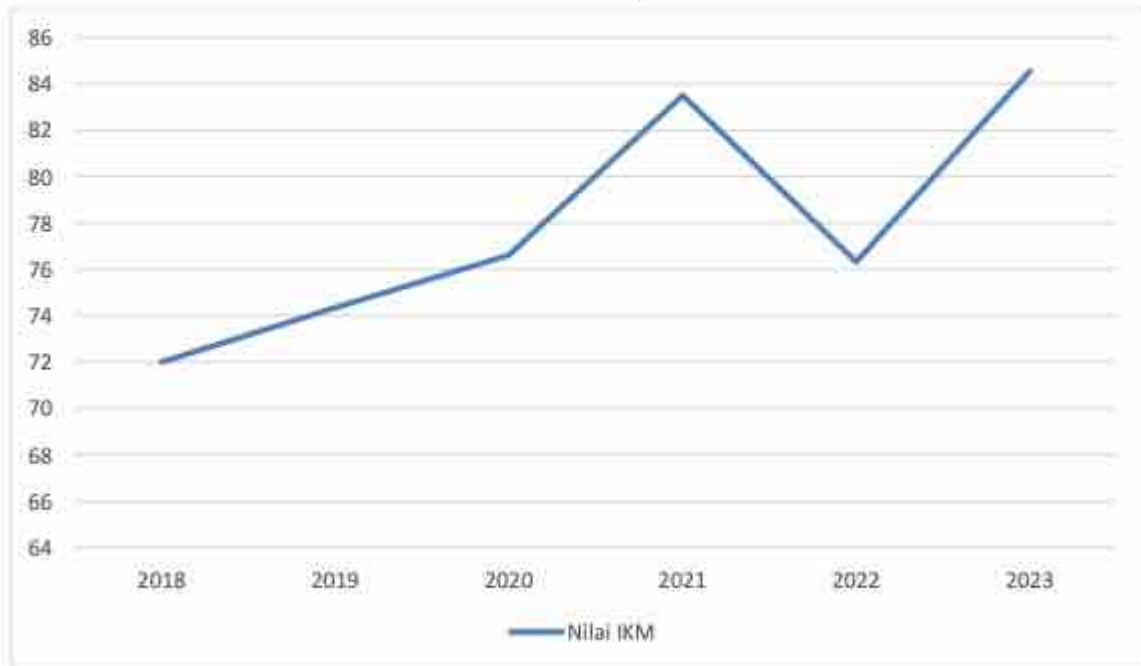
1. Membuat Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan kepegawaian yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melakukan evaluasi dan revisi SOP layanan kepegawaian;
3. Memberikan kesempatan dalam peningkatan kompetensi terkait *Service Excellent*;
4. Mengoptimalkan fungsi website BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Peremajaan data ASN secara berkala (setiap ada perubahan data ASN);
6. Meningkatkan peran atasan langsung dalam memverifikasi dokumen layanan kepegawaian;
7. Meningkatkan kompetensi teknis bagi pejabat pelaksana; dan
8. Mengusulkan anggaran untuk membangun ruang tunggu yang representatif bagi ASN.

Tabel 3.5

Realisasi Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM
Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Satuan	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Nilai	72,00	74,35	76,62	83,50	76,33	84,54
	Kenaikan/Penurunan			2,45	2,27	6,88	-7,17	8,21

Gambar 4 Perkembangan Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM Tahun 2018 s/d Tahun 2023



2) Capaian Indikator Indeks Sistem Merit.

Pada tahun 2023, BKPSDM menetapkan target kinerja indikator “Indeks Sistem Merit” sebesar 250. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada indikator tersebut mencapai 215. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 86,00% dari target yang ditetapkan. Meskipun capainnya di bawah target, evaluasi ini memberikan gambaran tentang pencapaian positif seiring upaya untuk meningkatkan Indeks Sistem Merit, serta memberikan pandangan untuk pengembangan dan perbaikan di masa mendatang.

Faktor-faktor penghambat pencapaian target kinerja ini antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman tentang Sistem Merit;
2. Kurangnya upaya perbaikan dan peningkatan implementasi sistem merit;
3. Sistem Merit masih dianggap pekerjaan tambahan; dan
4. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain pengampu Indeks Sistem Merit.

3) Capaian Indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti

Pada tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara diberi mandat target kinerja indikator **“Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti”** sejumlah 3 temuan. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah, sampai akhir tahun 2023 masih terdapat 1 temuan yang belum selesai ditindaklanjuti. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 66,67% dari target yang ditetapkan.

Berikut disajikan daftar Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang belum selesai ditindaklanjuti.

Tabel 3.6

Daftar Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Belum Selesai Ditindak Lanjuti

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Ket
1	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang Diberhentikan Sementara, Pegawai yang Sudah Meninggal Dunia, dan Terkena Hukuman Disiplin Sebesar Rp300.269.804,00	BPK merekomendasi Plt. Bupati Kutai Kartanegara agar memerintahkan Kepala BKPSDM menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pembuatan SK hukuman disiplin, pemberhentian sementara, dan pemberhentian pegawai yang meninggal dunia, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penggajian pegawai yang terkena hukuman disiplin dan diberhentikan	1. Intruksi Bupati kepada Kepala BKPSDM 2. SOP Pemberhentian PNS - BKPSDM 3. SOP Pensiun BUP-Janda-Duda-Yatim-Uzur dan APS Dengan Hak Pensiun-PNS_BKPSDM 4. SOP Penyelesaian Kasus Disiplin PNS	Belum Selesai (BKPSDM belum melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penggajian pegawai yang terkena hukuman disiplin dan diberhentikan)

Faktor penghambat capaian kinerja ini antara lain :

- Kurangnya pemahaman tentang eviden yang harus dipenuhi untuk menindaklanjuti temuan administrasi BPK/Inspektorat; dan
- Kurangnya koordinasi dengan Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

- 4) **Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah**
Target kinerja indikator **"Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah"** tahun 2023 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :
- a. Tersedianya aplikasi SIMDA BMD;
 - b. Kepatuhan penginputan Aset Tetap sebelum melakukan penagihan belanja modal; dan
 - c. Dukungan dan bimbingan dari Bidang Aset BPKAD Kab. Kutai Kartanegara dalam melakukan Rekonsiliasi Aset Tetap dan Pelaporan Pengelolaan BMD.
- 5) **Capaian Indikator Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**
Target kinerja indikator **"Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa"** tahun 2023 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :
- a. Komitmen Kepala BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk memaksimalkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Koordinasi dan kerjasama antara PPTK, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - c. Tersedianya metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya antara lain E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender.
- 6) **Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023**
Target kinerja indikator **"Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023"** tahun 2023 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen seluruh wajib LHKPN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan laporannya paling lambat 31 Maret 2023
 - b. Ketersediaan data dukung dari sub bagian keuangan terkait penghasilan selama tahun 2022.
- 7) **Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023**
Target kinerja indikator **“Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023”** tahun 2023 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :
- a. Komitmen seluruh wajib LHKASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan laporannya paling lambat 31 Maret 2023; dan
 - b. Ketersediaan data dukung dari sub bagian keuangan terkait penghasilan selama tahun 2022.
- 8) **Capaian Indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah**
Target kinerja indikator **“Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah”** tahun 2023 yaitu B (60-70) dengan realisasi B (77,40) atau capaian kinerja 129,00% dan melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :
- a. Penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dokumen-dokumen layanan kepegawaian;
 - b. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penandatanganan dokumen layanan kepegawaian; dan
 - c. Dukungan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara dalam memberikan bimbingan penyusunan Pengelolaan Arsip.
- 9) **Capaian Indikator Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau**
Target kinerja indikator **“Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau”** tahun 2023 sebesar 100,00% dan terealisasi

sebesar 100,00%. Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan Satu Data Kukar; dan
- b. Komitmen dari masing-masing penanggung jawab data untuk menginput data yang telah ditetapkan ke Aplikasi Satu Data Kukar “Becik” dan Aplikasi e-Pantau; dan
- c. Pemberian reward kepada Perangkat Daerah yang berhasil dalam pelaporan kinerja melalui Aplikasi e-Pantau.

10) Capaian Indikator Jumlah Inovasi

Target kinerja indikator “**Jumlah Inovasi**” tahun 2023 sejumlah 1 inovasi dan terealisasi sejumlah 1 inovasi sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung capaian target kinerja ini yaitu adanya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara terkait Kewajiban Perangkat Daerah membuat inovasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

11) Capaian Indikator Capaian Output Kegiatan

Target kinerja “**Capaian Output Kegiatan**” tahun 2023 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dari Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara beserta seluruh jajarannya untuk merealisasikan Kegiatan dan Sub Kegiatan tanpa menimbulkan utang;
- b. Ketersediaan Surat Penyediaan Dana yang mencukupi kebutuhan pendanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan di BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Dukungan dari PPTK untuk mempersiapkan administrasi pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Penggunaan aplikasi Amanda yang memudahkan proses permohonan Surat Penyediaan Dana dan penyampaian Surat Perintah Membayar ke BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

- e. Penggunaan FMIS sebagai aplikasi penatausahaan keuangan yang memudahkan proses penagihan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah.
- f. Penggunaan aplikasi e-Pantau yang memudahkan proses monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

12) Capaian Indikator Persentase Realisasi Kegiatan Fisik

Pada tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan target kinerja **"Persentase Realisasi Kegiatan Fisik"** sebesar 100,00%. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada indikator tersebut mencapai 96,09%. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan secara penuh, pencapaian sebesar 96,09% ini tetap mencerminkan upaya yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan fisik. Evaluasi yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Faktor penghambat capaian kinerja ini antara lain :

- a. Kurangnya koordinasi antara PPTK dengan pihak Narasumber/Penyelenggara Diklat/Bimtek yang mengakibatkan Diklat/Bimtek tidak bisa terlaksana karena terkendala tidak tersedianya Narasumber dan jadwal pelaksanaan Diklat/Bimtek.
- b. Terbatasnya penyedia jasa yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.

13) Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan

Pada tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan target kinerja **"Persentase Realisasi Keuangan"** sebesar 100,00%. Namun, melalui evaluasi kinerja, ditemukan bahwa realisasi kinerja pada indikator tersebut mencapai 89,63%. Meskipun terdapat perbedaan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai, pencapaian sebesar 89,63% ini tetap mencerminkan upaya yang signifikan dalam mengelola keuangan perangkat daerah.

Evaluasi ini dapat menjadi landasan untuk mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi realisasi tersebut. Kemungkinan faktor-

faktor seperti perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya keuangan, atau perubahan kondisi ekonomi perlu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap penyebab perbedaan tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang sesuai. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, penyesuaian strategi anggaran, atau implementasi perubahan dalam perencanaan keuangan untuk mencapai target yang ditetapkan lebih baik di masa mendatang.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja ini antara lain :

- a. Proses penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan karena kesalahan penganggaran;
- b. Proses penganggaran menggunakan aplikasi SIPD yang masih belum familiar sehingga proses penganggaran tidak sesuai target waktu yang ditetapkan, dan ada beberapa belanja yang belum ada dalam Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum sehingga dianggarkan secara gelondongan dan tidak sempat diperbaiki dalam proses APBDP
- c. Ketidaktepatan penyusunan anggaran dengan jadwal pembayaran;
- d. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang disusun; dan
- e. Aplikasi ATKP Bank Kaltim yang sering mengalami permasalahan pada akhir tahun anggaran.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, dapat dilakukan upaya berikut :

- a. Penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;

- b. Melakukan persiapan dalam hal tenaga SDM aparatur yang menyusun perencanaan penganggaran program dan kegiatan, mengidentifikasi kebutuhan belanja untuk proses pengusulan SBU dan SHS;
- c. Menyusun anggaran kas berdasarkan kebutuhan pembayaran belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah disusun serta anggaran kas yang ditetapkan; dan
- e. Koordinasi dengan Tim IT Bank Kaltimara terkait permasalahan yang sering terjadi pada aplikasi ATKP.

14) Capaian Indikator Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal tanggal 10 Januari

Target kinerja **“Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal tanggal 10 Januari”** tahun 2023 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- b. Kepatuhan PPTK menyusun dan menyampaikan Register Risiko sesuai jadwal yang ditetapkan.

15) Capaian Indikator Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama

Target kinerja **“Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama”** tahun 2023 sejumlah 1 Dokumen dan direalisasikan sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Dukungan dari seluruh Bidang untuk menyediakan data terkini terkait Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara;
- b. Keterbukaan menerima saran dan pendapat serta perubahan dalam pandangan atau prioritas organisasi; dan
- c. Fleksibilitas untuk menyesuaikan IKU berdasarkan kebutuhan dan dinamika organisasi.

16) Capaian Indikator Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader dan Tim Budaya Kerja

Target kinerja **“Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader dan Tim Budaya Kerja”** tahun 2023 sebanyak 4 Kegiatan dan terealisasi 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

- a. Tersedianya kebijakan kepala daerah terhadap implementasi ASN berakhlak; dan
- b. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.

17) Capaian Indikator Persentase Pengembangan Kompetensi ASN

Target kinerja **“Persentase Pengembangan Kompetensi ASN”** tahun 2023 sebesar 100,00%. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja indikator ini mencapai 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Adanya kebijakan yang mewajibkan setiap ASN untuk mengembangkan kompetensinya minimal 20 JP per tahun;
- b. Anggaran pengembangan kompetensi semakin meningkat;
- c. Tersedianya ruang belajar di Perangkat Daerah lain sebagai tempat pengembangan kompetensi;
- d. Tersedianya bermacam-macam media pengembangan kompetensi; dan
- e. Penyempurnaan Simpeg yang terintegrasi dengan SIASN.

18) Capaian Indikator Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Target kinerja indikator **“Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** tahun 2023 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%. Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Pemenuhan Data Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijadikan indikator pada Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator dan Sub Koordinator;

- b. Tersedianya aplikasi untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Tersedianya aplikasi SIASN;
- d. Tersedianya aplikasi Simpeg Idaman yang terintegrasi SIASN; dan
- e. Bimbingan dan dukungan dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

19) Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK

Target kinerja “**Capaian Output Kegiatan**” tahun 2023 sebesar 100,00%. Namun berdasarkan hasil evaluasi Tim Inspektorat Daerah, ditemukan bahwa realisasi pada indikator tersebut mencapai 70,95% dan masih jauh di bawah target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang menghambat pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam menyiapkan data dukung untuk memenuhi kriteria yang diminta oleh Kemendagri melalui Inspektorat; dan
- b. Belum terbangunnya kolaborasi dari beberapa OPD untuk melaksanakan MCP KPK.

20) Capaian Indikator Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran

Target kinerja “**Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran**” tahun 2023 sebesar 100 point. Berdasarkan hasil perhitungan mandiri, realisasi kinerja indikator tersebut mencapai 100,00%. Faktor pendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Adanya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. Dukungan dan komitmen dari Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 97,07%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 100,62%. Terjadi penurunan kinerja sebesar 3,55%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Indeks	80	76.33	95.41%	82	84.54	103.10%	Meningkat
Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Indeks Sistem Merit	Nilai				250	215	86.00%	
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	2	2	100.00%	3	2	66.67%	Menurun
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen				100	100	100.00%	
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen				100	100	100.00%	
Melaksanakan Identifikasi dan Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100.00%				
Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persentase ketepatan waktu & kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100.00%				
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap

Aparatur Sipil Negara (LHKASN)									
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	66,86	111.43%	Baik (B) 60-70	77.4	129.00%	Meningkat
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Tetap
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen				100	96.09	96.09%	
	Persentase Realisasi Keuangan	Persen				100	89.63	89.63%	
Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerah	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan				2	2	100.00%	
Melaksanakan Review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Review Indikator Kinerja Utama	Dokumen				1	1	100.00%	
Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim Budaya Kerja	Kegiatan				4	4	100.00%	
Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen				100	100	100.00%	
Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen				100	70.95	70.95%	
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin				100	100	100.00%	
Rata-rata Capaian Kinerja					100.62%			97.07%	Menurun

Pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 terdapat beberapa catatan atas belum optimalnya capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), antara lain :

- Melakukan perbaikan pada Perencanaan Kinerja, meliputi :

- 1.b.2 “Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu pada Website BKPSDM atau Media yang ditunjuk untuk publikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Atas rekomendasi ini BKPSDM telah menindaklanjutinya dengan mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu sesuai ketentuan pada Website BKPSDM (<https://bkpsdm.kukarkab.go.id/>) dan <https://sakup.kukarkab.go.id/>

- 1.c.3 “Menginstruksikan kepada pejabat pengampu indikator program dan kegiatan untuk mengoptimalkan capaian target kinerja pada tahun berikutnya”.

Atas rekomendasi ini BKPSDM telah menindaklanjutinya dengan Nota Dinas Nomor : P-17/BKPSDM/000.7.2.10/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Eselon III, IV dan PPTK untuk mengoptimalkan capaian target kinerja tahun 2023 dan tahun berikutnya.

- b. Melakukan perbaikan pada Pengukuran Kinerja, meliputi :

- 2.c.8 “Menginstruksikan kepada pejabat struktural dan PPTK untuk melaksanakan program/kegiatan secara efisien dalam penggunaan anggaran”.

Atas rekomendasi ini BKPSDM telah menindaklanjutinya dengan Nota Dinas Nomor : P-18/BKPSDM/000.7.2.10/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Eselon III, IV dan PPTK untuk melaksanakan program/kegiatan secara efisien dalam penggunaan anggaran.

- c. Melakukan perbaikan pada Pelaporan Kinerja, meliputi :

- 3.b.6 “Menyajikan data informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada LKjIP”.

Atas rekomendasi ini BKPSDM telah menindaklanjutinya dengan Nota Dinas Nomor : P-19/BKPSDM/000.7.5/08/2023

tanggal 23 Agustus 2023 yang menginstruksikan kepada Perencana Ahli Muda BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk menyajikan data informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada LKjIP.

- d. Melakukan perbaikan pada Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal, meliputi :

4.c.4 “Menginstruksikan kepada seluruh pejabat Struktural dan PPTK agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023”.

Atas rekomendasi ini BKPSDM telah menindaklanjutinya dengan Nota Dinas tanggal 30 Mei 2023 yang menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Eselon III, IV dan PPTK untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	90	84,54	93,93

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Negara

Sampai dengan laporan ini disusun, BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat belum merilis hasil survei kepuasan masyarakat semester II Tahun 2023, dan yang dijadikan perbandingan adalah hasil survei kepuasan masyarakat semester I tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ini dengan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat

Instansi	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja
BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	84,54
BKD Provinsi Kalimantan Timur	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	89,96
BKN Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan BKN	90,32

Perbandingan realisasi kinerja dalam tabel di atas dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki indeks kepuasan yang lebih rendah dibandingkan dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kedua instansi tersebut. Penting bagi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai kepuasan masyarakat yang lebih tinggi.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	103,10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,43	10,67	Efisien
			Program Kepegawaian Daerah	80,62	22,48	Efisien
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,51	13,59	Efisien
		103,10		89,63	13,47	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai 103,10% sehingga dapat disimpulkan bahwa BKPSDM dalam pelaksanaan Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis selama tahun 2023 telah melakukan “Efisiensi” sebesar 13,47%.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11
Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92	92,70	100,76%

Target Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar 92 dan realisasinya 92,70 atau capaian kinerja sebesar 100,76%, realisasi kinerja melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja ini yaitu :

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Penerapan teknologi informasi pada beberapa program/kegiatan (aplikasi Simpeg Idaman, Sim Gaji, FMIS, SIPD, Simda BMD, e-Pantau dan Srikandi).

- c. Perubahan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;

Meskipun capaian kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” sudah melebihi target kinerja yang ditetapkan, evaluasi menyeluruh masih diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut. Dalam mengevaluasi pencapaian di atas target, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti efektivitas implementasi program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak positif yang dihasilkan terhadap pelayanan publik. Analisis mendalam ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif untuk mendukung pengembangan strategi dan perencanaan ke depan, sehingga pencapaian yang baik ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan lebih lanjut. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah dicapai, antara lain :

- a. Meningkatkan pengembangan kompetensi bagi SDM aparatur di lingkungan BKPSDM melalui diklat, bimtek dan lain-lain terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berkala (minimal 3 bulan 1 kali); dan
 - c. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan seperti Srikandi, SIASN, Simpeg Idaman, SIPD RI dan Simda BMD.
- 2) Program Kepegawaian Daerah

Indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Indikator Kinerja Program Kepegawaian Daerah
Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93%	99,97%	107,49%

Indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah Tahun 2023 sebesar 93,00% dan realisasi 99,97% atau capaian kinerja sebesar 107,49%. Capaian target kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah tahun 2023 melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja yaitu :

- a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terbaru yang disesuaikan dengan SOTK Perangkat Daerah yang menjadi dasar penyusunan Bezetting dan Existing pegawai sebagai dasar untuk menyusun kebutuhan jabatan baik jabatan administrasi maupun jabatan fungsional.
- b. Persetujuan Kemenpan RB terhadap usulan formasi penerimaan PPPK tahun 2023 sebesar 3.000 formasi.
- c. Tersedianya anggaran dan fasilitas lainnya untuk melaksanakan rekrutmen PPPK tahun 2023.

3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Target indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 sebesar 28,00% dan realisasi 29,64% atau capaian kinerja sebesar 105,86%. Capaian kinerja untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

1. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;

2. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun;
3. Tersedianya *Human Capital Development Plan*, meskipun belum mengakomodasi kebutuhan seluruh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Anggaran pengembangan kompetensi yang semakin meningkat; dan
5. Tersedianya ruang belajar di beberapa Perangkat Daerah sebagai tempat pengembangan kompetensi

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	% Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92	92,70	100,76%	1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Penerapan teknologi informasi pada beberapa program/kegiatan (aplikasi Simpeg Idaman, Sim Gaji, FMIS, SIPD, Simda BMD, e-Pantau dan Srikandi). 3. Perubahan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93	99,97	107,49%	1. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terbaru yang disesuaikan dengan SOTK Perangkat Daerah yang menjadi dasar penyusunan Bezetting dan Existing pegawai sebagai dasar untuk menyusun kebutuhan jabatan baik jabatan administrasi maupun jabatan fungsional 2. Persetujuan Kemenpan RB terhadap usulan formasi penerimaan PPPK tahun 2023 sebesar 3.000 formasi 3. Tersedianya anggaran dan fasilitas lainnya untuk melaksanakan rekrutmen PPPK Tahun 2023
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	28,00	29,64	105,86%	1. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/ Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan; 2. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun 3. Tersedianya <i>Human Capital Development Plan</i>, meskipun belum mengakomodasi kebutuhan seluruh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Anggaran pengembangan kompetensi yang semakin meningkat; dan 5. Tersedianya ruang belajar di beberapa Perangkat Daerah sebagai tempat pengembangan kompetensi

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 86,18%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	24.302.862.422,00	22.462.558.412,00	92,43%	
		Program Kepegawaian Daerah	7.433.872.500,00	5.992.915.483,00	80,62%	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.760.459.820,00	7.841.336.911,00	89,51%	
Total			40.497.194.742,00	36.296.810.806,00	89,63%	

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2022) realisasi anggaran sebesar 86,18%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2022)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	22.227.740.842,00	19.575.565.549,00	88,07%	2.652.175.293,00
		Program Kepegawaian Daerah	5.304.454.000,00	4.054.279.556,00	76,43%	1.250.174.444,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.914.000.000,00	2.609.038.640,00	89,53%	304.961.360,00
Total			30.446.194.842,00	26.238.883.745,00	86,18%	4.207.311.097,00

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 3,45%.

The page features a light cream background with abstract orange geometric shapes in the corners. In the top right, there are overlapping orange triangles and a thin white line. In the bottom left, there are similar orange shapes and a thin white line.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 rata-rata sebesar 97,07% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja indikator **"Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM"** sebesar 103,10% (Sangat Tinggi);
- 2) Capaian kinerja indikator **"Indeks Sistem Merit"** sebesar 86,00% (Tinggi);
- 3) Capaian kinerja indikator **"Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti"** sebesar 66,67%. (Sedang);
- 4) Capaian kinerja indikator **"Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah"** sebesar 100,00% (Sangat Tinggi);
- 5) Capaian kinerja indikator **"Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa"** sebesar 100,00% (Sangat Tinggi);
- 6) Capaian kinerja indikator **"Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023"** sebesar 100,00% (Sangat Tinggi);
- 7) Capaian kinerja indikator **"Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023"** sebesar 100,00% (Sangat Tinggi);
- 8) Capaian kinerja indikator **"Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah"** sebesar 129,00% (Sangat Tinggi);
- 9) Capaian kinerja indikator **"Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau"** sebesar 100,00% (Sangat Tinggi);
- 10) Capaian kinerja indikator **"Jumlah Inovasi"** sebesar 100,00% (Sangat Tinggi);
- 11) Capaian kinerja indikator **"Capaian Output Kegiatan"** sebesar 100,00% (Sangat Tinggi);

- 12) Capaian kinerja indikator **“Persentase Realisasi Kegiatan Fisik”** sebesar **96,09% (Sangat Tinggi)**;
- 13) Capaian kinerja indikator **“Persentase Realisasi Keuangan”** sebesar **89,63% (Tinggi)**;
- 14) Capaian kinerja indikator **“Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari”** sebesar **100,00% (Sangat Tinggi)**;
- 15) Capaian indikator kinerja **“Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama”** sebesar **100,00% (Sangat Tinggi)**;
- 16) Capaian indikator kinerja **“Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim Budaya Kerja”** sebesar **100,00% (Sangat Tinggi)**;
- 17) Capaian indikator kinerja **“Persentase Pengembangan Kompetensi ASN”** sebesar **100,00% (Sangat Tinggi)**;
- 18) Capaian indikator kinerja **“Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** sebesar **100,00% (Sangat Tinggi)**;
- 19) Capaian indikator kinerja **“Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK”** sebesar **70,95% (Sedang)**; dan
- 20) Capaian indikator kinerja **“Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran”** sebesar **100,00% (Sangat Tinggi)**.

Capaian kinerja tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 100,62% sedangkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 97,07% atau mengalami penurunan sebesar 3,55%

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Menyusun anggaran kas berdasarkan kebutuhan pembayaran belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) Konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah disusun serta anggaran kas yang ditetapkan
- 4) Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rutin dan konsisten;
- 5) Optimalisasi kualitas manajemen ASN berbasis Sistem Merit;
- 6) Optimalisasi dan validasi data untuk pemberian ijin belajar dan tugas belajar;
- 7) Optimalisasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
- 8) Peremajaan Database ASN secara berkala (setiap ada perubahan data ASN);
- 9) Meningkatkan sinergitas dengan BKD Provinsi, BKN regional dan BKN Pusat serta lembaga terkait;
- 10) Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian;
- 11) Membuat Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan kepegawaian yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12) Melakukan evaluasi dan revisi SOP layanan kepegawaian;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 19 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. RAKHMADI, S.Sos.

LAMPIRAN

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2023**

SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	KINERJA CAPAIAN PER TRIWULAN				ANGSARAN	PENANGGUNG JAWAB	
														I	II	III	IV			
Meningkatkan Manajemen Birokrasi Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi																			
		Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara		Indeks Profesionalitas ASN	85 Nilai															
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BAPSOM	82 Nilai														Kepala Badan	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai										Sekretaris	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen						7	4	5	4	176.500.000,00	Sekretaris
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		0	1	1	0	45.130.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen		5	3	4	3	46.500.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertataannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen		2	0	0	1	84.890.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 laporan						4	4	1	5	12.118.796.171,00	Sekretaris
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1412 ASN/bulan		853	854	854	853	11.974.796.171,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		1	0	0	0	50.000.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan		3	3	3	3	95.000.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)

						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen							0	1	0	1	44.840.000,00	Sekretaris	
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan			0	1	0	1	44.840.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
						Administrasi	Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen											540.480.000,00	Sekretaris	
										Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket			0	0	1	2	450.480.000,00	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang			0	25	25	0	50.000.000,00	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 layanan											1.294.500.000,00	Sekretaris	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket			1	0	0	0	150.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			2	1	0	0	150.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			0	1	0	2	200.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			0	0	0	0		Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
										Fasilitas Kunjungan Tamu	Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan			0	0	0	1	125.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan			0	0	0	1	344.500.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen			100	125	100	125	100.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen			0	0	0	3	225.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%											8.891.307.593,00	Sekretaris	
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	297 Unit			0	31	0	266	8.209.599.843,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	142 Unit			0	13	0	127	621.707.750,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 bulan								3	3	3	3	995.444.638,00	Sekretaris
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan			0	0	0	1	22.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Tatakelola	

									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3	3	3	3	184.355.800,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	0	0	0	1	112.017.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3	3	3	3	877.031.836,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	12 unit								300.000.000,00	Sekretaris
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 unit	2	4	2	4	300.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
						Program Kepegawaian Daerah	Terselenggaranya kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	53,00%									1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian 2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
						Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terselenggaranya pengadaan dan pemberhentian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1147 ASN				131	132	132	752	1.778.559.000,00	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian
									Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	0	0	1	0	75.000.000,00	Indah Wahyuniati, S.Psi
									Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 dokumen	0	0	0	2	748.023.000,00	Luthfi Fachruri, S.Kom
									Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	0	0	0	1	100.000.000,00	Muhammad Rifari, S.Sos
									Fasilitasi lembaga profesi ASN	Terselenggaranya Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	0	0	0	1	500.000.000,00	Syarif Sofia Heida, S.Sos
									Pengelolaan data kepegawaian	Terselenggaranya Data kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	0	0	0	2	302.210.000,00	Aji Rifqi Mirza, S.Kom
									Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terselenggaranya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	0	0	0	1	53.324.000,00	Syarif, SE
						Mutasi dan Promosi ASN	Terselenggaranya mutasi dan promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosikan	2928 ASN				336	1052	176	1364	625.000.000,00	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

											Pengelolaan Mutasi ASN	Tertaksananya Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi: Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dokumen	0	0	0	1	225.000.000,00	Hariadi Rifani, S.Sos	
											Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Tertaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 dokumen	0	0	0	1	200.000.000,00	Hj. Indrawati, S.Sos	
											Pengelolaan promosi ASN	Tertaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 dokumen	0	0	0	1	200.000.000,00	Eka Purwati, S.Sos	
						Pengembangan kompetensi ASN	Tertaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	751 ASN							110	180	277	184	4.490.313.500,00	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
											Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitas	544 Orang	90	120	140	194	2.281.005.500,00	Suherman, SH	
											Pengelolaan Assessment Center	Tertaksananya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 dokumen	0	0	0	2	1.003.247.000,00	Rokip, S.STP, M.Si	
											Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Tertaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	127 Orang	20	30	77	0	1.206.061.000,00	Muht, Irfan Setiawan, SH	
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tertaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12.607 ASN							2607	3000	4000	3000	540.000.000,00	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan
											Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	0	0	0	1	100.000.000,00	Anotis Sumber Daya Aparatur Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi	
											Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tertaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	0	0	0	1	125.000.000,00	Bere Siswanto, SE	
											Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tertaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	0	0	0	1	75.000.000,00	Nuryanti, S.Psi	
											Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Tertaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 laporan	0	0	0	1	130.000.000,00	Dr. Achmad Jais, SE, M.Si	
											Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Tertaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	176 Orang	0	0	0	176	60.000.000,00	Dr. Achmad Jais, SE, M.Si	
											Pelayanan Proses lain Penerimaan Pegawai	Tertaksananya Pelayanan Proses lain Penerimaan Pegawai	Jumlah Dokumen Proses lain Penerimaan Pegawai yang Dilayani	2 Dokumen	0	0	0	2	50.000.000,00	Zunaldi, SE	
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65%												Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
						Pengembangan kompetensi Teknis	Tertaksananya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	670 ASN							150	55	165	250	4.508.381.820,00	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
											Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tertaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen				1	374.964.820,00	Rokip, S.STP, M.Si	

									Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administratif penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten, pemerintah daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Tertindakannya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administratif Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kabupaten, Penunjang Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	820 Orang	150	55	165	150	4.121.227.000,00	Pusp, S.STP, M.Si	
						Sertifikasi, Kompetensi, pengembangan kemampuan manajerial dan fungsional	Tertindakannya Sertifikasi, kompetensi, pengembangan kemampuan manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kemampuan manajerial dan fungsional	418 ASN					15	58	140	89	4.332.099.000,00	Reza Bilang Pengembangan Kompetensi Aparatur
									Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tertindakannya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi di Lingkungan Kabupaten/Kota	13 Orang	0	0	4	4	210.000.000,00	Riky, S.STP, M.Si	
									Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan pejabat lain	Tertindakannya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pejabat Lain	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan pejabat lain	5 Laporan	0	0	0	5	4.022.099.000,00	Muhd. Irfan Setiawan, SH	
																		40.497.254.742,00	



06 Desember 2023
 Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 RAHMAD, S.Sos
 19690107 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. RAKHMADI, S.Sos.

Jabatan : KEPALA BADAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

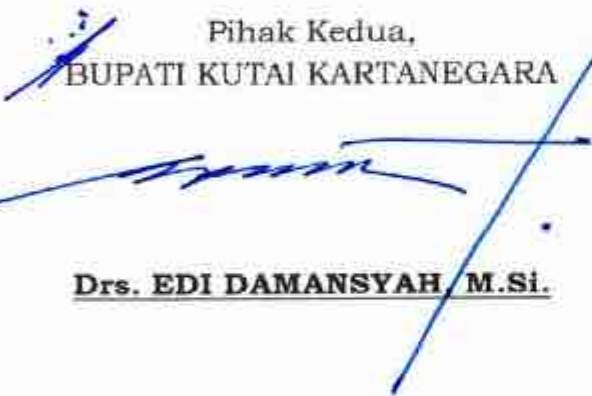
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN


H. RAKHMADI, S.Sos.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Tingkat	82
2	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	250
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	3
4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
5	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100

6	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
8	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
11	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
12	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2

13	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
14	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
16	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
17	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100
18	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

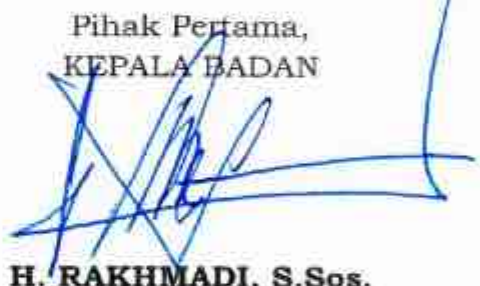
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.302.862.422,00	APBD
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.433.872.500,00	APBD
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.760.459.820,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		40.497.194.742,00	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN


H. RAKHMADI, S.Sos.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196601072000121003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUHADA**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. RAKHMADI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
3. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
9. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;

10. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
11. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
12. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
13. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA


H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	92
2	Tersusunnya dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20
3	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15
4	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2
5	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2
6	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7
7	Meningkatnya Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
8	Tersedianya waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12
9	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	12
10	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	82
11	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
12	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
13	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100

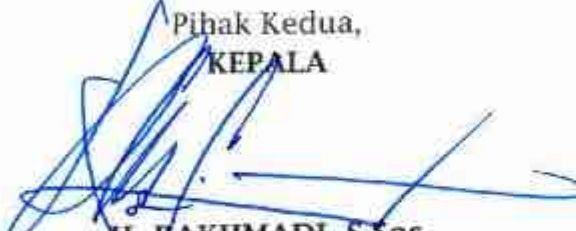
14	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
15	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
16	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
17	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
18	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
19.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
20.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
21.	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100
22.	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.500.000,00	APBDP
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.119.790.171,00	APBDP
3.	Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.840.000,00	APBDP
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	540.480.000,00	APBDP
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.294.500.000,00	APBDP

6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.831.307.593,00	APBDP
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	995.444.658,00	APBDP
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000,00	APBDP
Jumlah Anggaran		24.302.862.422,000	APBDP

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA

H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Drs. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOKO WIDIARTO, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.RAKHMADI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
9. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

10. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;
11. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
12. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
13. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN**



JOKO WIDIARTO, S.Sos
PENATA TK.I (III/D)
NIP. 19651101 200012 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	93
2.	Terlaksananya pengadaan dan pemberhentian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN	1.147
3.	Meningkatnya pelayanan pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi lembaga profesi ASN	Persentase permohonan layanan pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi lembaga profesi ASN yang selesai sesuai SOP	Persen	72,50
4.	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian terupdate/terbarukan	Persen	75,50
5.	Tersedianya data Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Data Pegawai menurut pendidikan PT ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
6.	Tersedianya seluruh data pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Data Pegawai menurut pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
7.	Tersedianya data pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Data pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
8.	Tersedianya data seluruh pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Data seluruh pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	82
10.	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	54,50
11.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
12.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

13.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
14.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
15.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
16.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
17.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
18.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
19.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
20.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
21.	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
22.	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1.778.559.000,00	APBDP
Jumlah Anggaran		1.778.559.000,00	APBDP

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA


H. RAHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)

NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN


JOKO WIDIARTO, S.Sos
PENATA TK.I (III/D)
NIP. 19651101 200012 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. ACHMAD JAIS, SE., M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H.RAKHMADI,S.Sos

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

9. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;
11. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
12. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
13. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

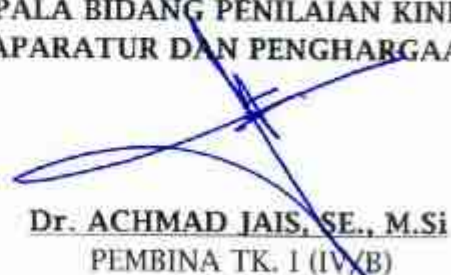
Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA TK. 1 (IV/B)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN PENGHARGAAN**



Dr. ACHMAD JAIS, SE., M.Si
PEMBINA TK. 1 (IV/B)
NIP. 19700405 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN	12.512
2.	Meningkatnya Prestasi Kinerja ASN	Persentase ASN yang memiliki SKP dengan Predikat Baik Keatas	Persen	78
3.	Tercapaiannya Tingkat penyelesaian kasus disiplin kepegawaian	Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan	Persen	77
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	82
5.	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	102
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
7.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
8.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
9.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
10.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
11.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1

12.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
13.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
14.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
15.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
16.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
17.	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	540.000.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		540.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA TK. I (IV/B)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN PENGHARGAAN**



Dr. ACHMAD JAÏS, SE., M.Si
PEMBINA TK. I (IV/B)
NIP. 19700405 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROKIP, S.STP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.RAKHMADI,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
9. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

10. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;
11. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
12. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAKHLAK";
13. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
16. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
17. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA


H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR**


ROKIP, S.STP., M.Si
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19860412 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	ASN	751
2.	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Tingkat Pengembangan kompetensi ASN	Persen	34,17
3.	Meningkatnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen	28
4.	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN	620
5.	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1
6.	Terlaksananya Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	ASN	413
7.	Tersedianya data pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Data pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	82
9.	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	88
10.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	2
11.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

12.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
13.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
14.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
15.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
16.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
17.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
18.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
19.	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader dan Tim budaya kerja	Kegiatan	4
20.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
21.	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
22.	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Pengembangan Kompetensi ASN	4.490.313.500,00	APBDP
2.	Pengembangan Kompetensi Teknis	4.508.361.820,00	APBDP
3.	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	4.252.098.000,00	APBDP
Jumlah Anggaran		13.250.773.320,00	APBDP

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR**



ROKIP, S.STP., M.Si
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19860412 200412 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUZULUL RAHMAN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SUHADA**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
9. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;
12. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
13. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
14. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

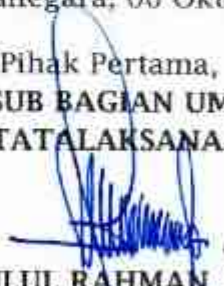
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA
PENATA TK. I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN**


NUZULUL RAHMAN, S.Sos
PENATA MUDA TK. I (III/B)
NIP. 19681207 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2
2	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
3	Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3
4	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3
5	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
6	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2
7	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	450
8	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3
9	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	297
10	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	142
11	Terlaksananya pengiriman surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
12	Terlaksananya pembayaran rekening air, telepon dan jasa internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
13	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1
14	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12

15	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12
16	Terlaksana & Terlaporkannya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
17	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka & bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif & akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
18	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
19	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
20	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
21	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
22	Terlaksananya percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
23	Terlaksananya Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
24	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
25	Terlaksananya Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100
26	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	APBDP
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	APBDP
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000,00	APBDP
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.000.000,00	APBDP
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.500.000,00	APBDP
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00	APBDP
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	225.000.000,00	APBDP
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.209.599.843,00	APBDP
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	621.707.750,00	APBDP
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,00	APBDP
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.355.800,00	APBDP
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.057.000,00	APBDP
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	677.031.858,00	APBDP
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000,00	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		11.421.252.251,00	

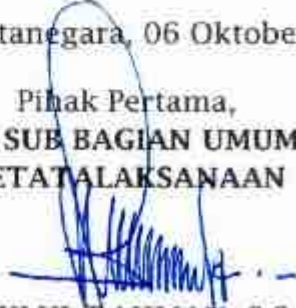
Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA

PENATA TK. I (III/D)
 NIP. 19651005 198703 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN


NUZULUL RAHMAN, S.Sos

PENATA MUDA TK. I (III/B)
 NIP. 19681201 200012 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUH. ASRI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SUHADA**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
3. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
4. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
5. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
6. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
7. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
8. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;
9. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
10. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;

11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

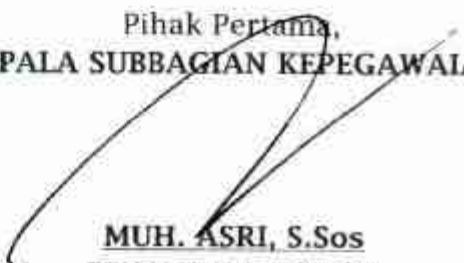
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA
PENATA TK. I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Pertama,
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN


MUH. ASRI, S.Sos
PENATA TK. I (III/D)
NIP. 19661029 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3
2	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN	ASN	50
3	Tersusunnya Laporan Absensi ASN BKPSDM	Jumlah Rekapitulasi Absensi ASN BKPSDM	Dokumen	1
4	Tersusunnya Laporan Harian Kerja ASN BKPSDM	Jumlah Laporan Harian Kerja ASN BKPSDM	dokumen	1
5	Terlaksananya pelayanan administrasi cuti bagi ASN BKPSDM	Laporan pelayanan administrasi cuti bagi ASN BKPSDM	Laporan	1
6	Terlaksananya pelayanan administrasi kenpa dan pensiun bagi ASN BKPSDM	Laporan pelayanan administrasi kenpa dan pensiun bagi ASN BKPSDM	Laporan	1
7	Terlaksananya pelayanan administrasi KGB bagi ASN BKPSDM	Laporan pelayanan administrasi KGB bagi ASN BKPSDM	Laporan	1
8	Tersusunnya laporan SKP ASN BKPSDM	Jumlah rekapitulasi SKP ASN BKPSDM	Dokumen	1
9	Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan BKPSDM	Menyusun Daftar Urut Kepangkatan	Dokumen	1
10	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
11	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
12	Terpenuhinya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
13	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

14	Terlaksananya percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
15	Terlaksananya Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
16	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
17	Terlaksananya Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

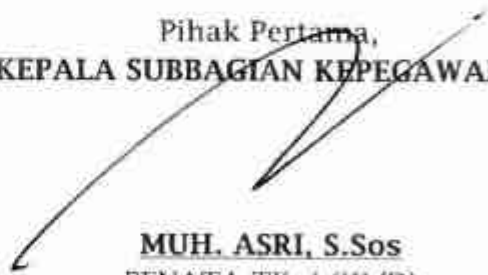
NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	490.480.000,00	APBDP
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		540.480.000,00	APBDP

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA
PENATA TK. I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Pertama,
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN


MUH. ASRI, S.Sos
PENATA TK. I (III/D)
NIP. 19661029 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHDAN, SE

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SUHADA

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
3. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
4. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
5. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;
6. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
7. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
8. Menyajikan Data Rancangan Awal Rencana Kerja pada aplikasi SIPD RI;
9. Menyajikan Data Paket Pekerjaan pada Aplikasi e-RPJMD Kutai Kartanegara;
10. Menyajikan Data Rancangan Akhir Rencana Kerja pada Aplikasi SIPD RI;

11. Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
12. Menyusun Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah;
13. Menyusun Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
14. Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN;
15. Menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
16. Memverifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Dty. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA


MUKHDAN, SE
PENATA (III/C)
NIP. 19740707 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data Rancangan Awal Rencana Kerja pada Aplikasi SIPD RI	Jumlah Sub Kegiatan Yang Diinput pada Aplikasi SIPD RI	Data	44
2	Tersedianya Data Paket Pekerjaan pada Aplikasi e-RPJMD Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pekerjaan yang diinput pada Aplikasi e-RPJMD Kutai Kartanegara	Data	93
3	Tersedianya Data Rancangan Akhir Rencana Kerja pada Aplikasi SIPD RI	Jumlah Sub Kegiatan Yang Diinput pada Aplikasi SIPD RI	Data	45
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10
5	Tersedianya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	5
6	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1412
8	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	25
9	Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah yang diverifikasi	Dokumen	1875
10	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN per tanggal 31 Maret 2023	Persen	100
11	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
12	Terpenuhinya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Panatu	Persen	100
13	Terlaksananya Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Minimal 10 Januari	Laporan	2

14	Terlaksananya reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
15	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.110.000,00	APBDP
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.500.000,00	APBDP
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.890.000,00	APBDP
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.974.790.171,00	APBDP
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	95.000.000,00	APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.840.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		12.341.130.171,00	

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA


MUKHDAN, SE
PENATA (III/C)
NIP. 19740707 199803 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHERMAN, SH**

Jabatan : **ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ROKIP, S.STP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
5. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
6. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
7. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
8. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;
9. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
10. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;

11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 6 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR**


ROKIP, S.STV., M.Si
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198604122004121001

Pihak Pertama,
ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA


SUPERMAN, SH
PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
NIP. 198105212012121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Input Data Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Data yang diinput ke dalam Aspek Penilaian Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Aspek Penilaian	2
2.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
	Terlaksananya Input data Aplikasi E-Pantau	Persentase keterisian data pada Aplikasi E-Pantau	Persen	100
3.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
4.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan Fisik	Persen	90-100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	80-100
5.	Melaksanakan manajemen risiko terhadap program kegiatan	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal 10 Januari	Laporan	1
6.	Mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 Tahun	Jumlah Jam Pembelajaran Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti	Jam Pembelajaran	20
7.	Terlaksananya input data Monitoring Center for Prevention KPK	Jumlah Dokumen yang diinput ke Monitoring Center for Prevention KPK	Dokumen	2
8.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	ASN	544
9.	Tersusunnya Jadwal Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	Jadwal	9
10.	Tersedianya Sertifikat Pelatihan bagi ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Sertifikat Pelatihan	ASN	544
11.	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelatihan ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan ASN	Laporan	1

KEGIATAN DAN ANGGARAN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2.281.005.500,00	APBD
Jumlah Anggaran		2.281.005.500,00	APBD

Kutai Kartanegara, 6 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR**


ROKIP, S.STP., M.Si
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198604122004121001

Pihak Pertama,
ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA


SUHERMAN, SH
PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
NIP. 198105212012121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AJI RIFQI MIRZA, S.Kom**

Jabatan : **ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JOKO WIDIARTO, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Seminar, lokakarya dibidang manajemen PNS Tingkat nasional/internasional sebagai : Peserta	Sertifikat Mengikuti Seminar	Sertifikat	5
2	Memverifikasi data dalam perbaikan data elektronik	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai	Data	100
3	Mengumpulkan data tenaga Honorer guru yang ada (TK, SD, SLTP, SMU & SMK)	Jumlah Data Tenaga Guru	Data	50
4	Mengumpulkan data tenaga kesehatan yang ada (pada Rumah Sakit & Puskesmas)	Jumlah Data Tenaga Kesehatan	Data	50
5	Mengentri data kepegawaian kedalam media komputer	Jumlah Data Kepegawaian	Data	1000
6	Mengumpulkan data pejabat fungsional yang ada	Jumlah Data pejabat Fungsional	Data	1000
7	Membuat naskah metode penyimpanan dokumen kepegawaian	Jumlah	Naskah	4000
8	Tersedianya Arsip Digital ASN	Arsip Digital ASN	Data	8000
9	Terlaksananya Rekonsiliasi	Jumlah Data Rekonsiliasi	Data	200

	Peremajan Data ASN	Peremajaan Data ASN		
10	Teraksananya Fasilitasi Konversi NIP ASN	Perbaikan Nama, Tanggal Lahir dan Nip ASN	ASN	50
11	Terlaksananya Perbaikan data Anomali Mysapk	Temuan data Anomali ASN Hasil Pemeriksaan dari BKN untuk ditindak lanjuti	ASN	7128
12	Terlaksananya Pembuatan Buku Profil Kepegawaian	menyusun buku profil Pegawai meliputi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	ASN	12400
13	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
14	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
15	Melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Data Simpeg Terintegrasi SIASN	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
16	pelaksanaan pengelolaan data aplikasi simpeg	Capaian Output Kegiatan	Persen	91

6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

**Pihak Kedua,
Plt.KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI**



JOKO WIDIARTO, S.Sos
PENATA TK.I III/d
NIP. 196511012000121005

Tenggarong, 06 Oktober 2023
**Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA**

AJI RIFQI MIRZA, S.Kom
PENATA TK.I III/d
NIP. 198207292010011004

	terintegrasi aktivasi asn			
17	Terlaksananya tahapan integrasi dua arah aplikasi simpeg ke siasn	Capaian Output Kegiatan	Persen	40
18	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
19	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Capaian Pengembangan Kompetensi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
(BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	DATA DAN INFORMASI	302.210.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN			

**Pihak Kedua,
Pit.KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI**



**JOKO WIDIARTO, S.Sos
PEMBINA TK.I III/d
NIP. 196511012000121005**

**Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023
Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA**

**AJI RIFAT MIRZA, S.Kom
PENATA TK.I III/d
NIP. 198207292010011004**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LUTHFI FACHRURI, S.Kom**

Jabatan : **ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JOKO WIDIARTO, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji :

1. Terlaksananya Proses Pengadaan PNS dan PPPK
2. Terlaksananya Proses pemberhentian dan pengaktifan kembali PNS
3. Terlaksananya Layanan Administrasi Pensiun
4. Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian
5. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
6. Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS Tepat waktu
7. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja PNS
8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi PNS
9. Terlaksananya Penyusunan data Kebutuhan dan Bezzeting ASN
10. Terlaksananya penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah
11. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
KEPEGAWAIAN**


JOKO WIDIARTO, S.Sos
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19651101 200012 1 005

Pihak Pertama,
**ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA**


LUTHFI FACHRURI, S.Kom
PENATA TK.I (III/d)
NIP.198212202010011024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen hasil kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Proses pemberhentian dan pengaktifan kembali sebagai PNS	Jumlah penetapan Proses pemberhentian dan pengaktifan kembali sebagai PNS	Dokumen	3
3.	Terlaksananya Layanan Administrasi Pensiun PNS	Jumlah Dokumen usulan dan penetapan layanan administrasi pensiun yang diselesaikan	Dokumen	168
4.	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data Sistem Informasi Kepegawaian yang di input dalam aplikasi kepegawaian sebagai peremajaan data	Data	368
5.	Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS Tepat waktu	Jumlah dokumen kenaikan pangkat PNS yang diproses tepat waktu	Dokumen	200
6.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja PNS	Jumlah dokumen Penilaian kinerja PNS yang dimonitoring / dievaluasi	Dokumen	400
7.	Terlaksananya Penyusunan data Kebutuhan dan Bezzeting ASN	Jumlah dokumen Penyusunan data Kebutuhan dan Bezzeting ASN	Dokumen	18
8.	Terlaksananya pengembangan kompetensi PNS	Jumlah pelatihan yang diikuti	Dokumen	3
9.	Terlaksananya penyusunan Karya Tulis/ Karya Ilmiah	Jumlah Karya Tulis/Karya Ilmiah yang disusun	Dokumen	1
10.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian secara lengkap	Jumlah Data yang dikelompokan menjadi database kepegawaian	Data	368
11.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	Persentase keterisian data di aplikasi Satu Data Kukar dan aplikasi e-Pantau	Persen	100

12.	Terealisasinya kegiatan menimbulkan utang	output tanpa potensi	Capaian output kegiatan	Persen	100
13.	Terlaksananya percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan		Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
			Persentase relisasasi keuangan	Persen	100
14.	Terlaksananya manajemen resiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya		Laporan penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
15.	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun		Persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100
16.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)		Tingkat Kepatuhan LHKASN Per tanggal 31 Maret 2023	Persen	100

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
 PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
 KEPEGAWAIAN**


JOKO WIDIARTO, S.Sos
 PENATA TK.I (III/d)
 NIP. 19651101 200012 1 005

Pihak Pertama,
**ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
 APARATUR AHLI MUDA**


LUTHFI FACHRURI, S.Kom
 PENATA TK.I (III/d)
 NIP.198212202010011024

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	748.025.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
KEPEGAWAIAN**


JOKO WIDIARTO, S.Sos
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19651101 200012 1 005

Pihak Pertama,
**ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA**


LUTHFI FACHRURI, S.Kom
PENATA TK.I (III/d)
NIP.198212202010011024



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MIRWAN ANSYARI,SE**

Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SUHADA**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin
2. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel
3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
6. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.
9. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 1 Agustus 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



Drs. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELUARAN



MIRWAN ANSYARI, SE
PENATA MUDA /III/A
NIP. 19831210 201001 1 023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen	dokumen	525
2.	Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	Jumlah Dokumen	dokumen	85
3.	Mengurus surat perintah pembayaran uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah Berkas	dokumen	85
4.	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah Tagihan	dokumen	146
5.	Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah Dokumen	dokumen	5
6.	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan	Jumlah Laporan	dokumen	5

	pertanggungjawaban			
7.	Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah perintah yang telah dilaksanakan	dokumen	63
8.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
9.	Menyelesaikan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Persen	100

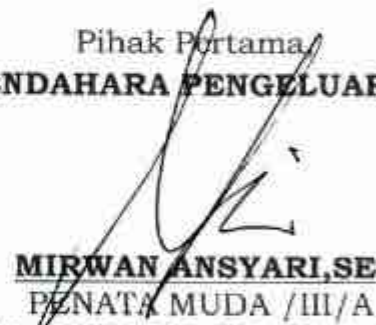
Kutai Kartanegara, 1 Agustus 2023.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



Drs. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELUARAN



MIRWAN ANSYARI, SE
PENATA MUDA /III/A
NIP. 19831210 201001 1 023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZUNAIIDI,SE**

Jabatan : **ANALIS PENEGAKKAN INTEGRITAS DISIPLIN SDM APARATUR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. ACHMAD JAIS,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Terlaksananya tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pemberian tanda Jasa bagi Pegawai;
2. Meningkatnya Pelayanan Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi ASN;
3. Tersedianya Peraturan Internal tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai berprestasi;
4. Tersedianya Peraturan Internal Instansi Tentang Kode Etik ASN;
5. Tersedianya Peraturan Internal Tata Cara Penegakkan Disiplin;
6. Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perceraian dan Tanda Jasa;
7. Tersedianya Dokumen Kelengkapan Hasil Temuan BPK yang di tindaklanjuti ;
8. Tersedianya Dokumen SPJ Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pelayanan Proses Ijin Perceraian;
9. Terlaksananya Tata Kelola Arsip Disiplin dan Penghargaan;

10. Terlaksananya Pelaporan/Upload Dokumen Output Kegiatan Penyelesaian Proses Ijin Perceraian Pegawai;
11. Tersedianya Inovasi Pelayanan Pemberian Penghargaan atau Tanda Jasa bagi Pegawai;
12. Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai tanpa menimbulkan Potensi utang;
13. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai;
14. Tersedianya Dokumen Reviu Indikator Kinerja;
15. Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP;
16. Tersedianya Data Monitoring Center For Prevention KPK;
17. terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KABID PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN PENGHARGAAN**

Dr. ACHMAD JAIS, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197004052000121004

Pihak Pertama,
**ANALIS PENEGAKKAN
INTEGRITAS DISIPLIN SUMBER
DAYA MANUSIA APARATUR**

ZUNAYDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 197608062001121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pemberian tanda Jasa bagi Pegawai;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi ASN;	Jumlah ASN	Orang	176
3.	Tersedianya Peraturan Internal tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai berprestasi;	Jumlah Kebijakan	Dokumen	1
4.	Tersedianya Peraturan Internal Instansi Tentang Kode Etik ASN;	Jumlah Kebijakan	Dokumen	1
5.	Tersedianya Peraturan Internal Tata Cara Penegakkan Disiplin;	Jumlah Kebijakan	Dokumen	1
6.	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perceraian dan Tanda Jasa;	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
7.	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Hasil Temuan BPK yang di tindaklanjuti ;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

8.	Tersedianya Dokumen SPJ Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pelayanan Proses Ijin Perceraian;	Presentase Pengelolaan Keuangan Belanja Barang Dan Jasa	Dokumen	1
9.	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Disiplin dan Penghargaan;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
10	Terlaksananya Pelaporan/Upload Dokumen Output Kegiatan Penyelesaian Proses Ijin Perceraian Pegawai;	Jumlah Laporan	Laporan	1
11	Tersedianya Inovasi Pelayanan Pemberian Penghargaan atau Tanda Jasa bagi Pegawai;	Jumlah Inovasi	Dokumen	1
12	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai tanpa menimbulkan Potensi utang;	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
13	Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai;	Presentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Presentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	95
14	Tersedianya Dokumen Reviu Indikator Kinerja;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

15	Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP;	Presentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
16	Tersedianya Data Monitoring Center For Prevention KPK;	Presentase Ketersediaan Data	Persen	100
17	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100

Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KABID PENILAIAN KINERJA
 APARATUR DAN PENGHARGAAN**

Dr. ACHMAD JAIS, SE., M.Si
 Pembina Tingkat I / IV/b
 NIP. 197004052000121004

Pihak Pertama,
**ANALIS PENEGAKKAN
 INTEGRITAS DISIPLIN SDM
 APARATUR**

ZUNAI, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 197608062001121004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

NOTA – DINAS

Kepada : Seluruh Pejabat Eselon III, IV dan PPTK di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
Dari : Kepala BKPSDM
Tanggal : 30 Mei 2023
Nomor : P-11/BKPSDM/000.7.2.6/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Dalam rangka memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023, dengan ini disampaikan instruksi sebagai berikut:

1. Evaluasi Program dan Kegiatan: Seluruh pejabat struktural dan PPTK diharapkan melakukan evaluasi mendalam terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023.
2. Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang matang merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh pejabat struktural dan PPTK diwajibkan untuk melakukan perencanaan yang sistematis dan terukur, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan mengoptimalkan alokasi anggaran secara efisien.
3. Pengawasan dan Pengendalian: Pejabat struktural dan PPTK bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Pastikan setiap kegiatan sesuai dengan perencanaan, waktu pelaksanaan yang ditentukan, dan anggaran yang telah disetujui. Lakukan pemantauan secara berkala, evaluasi, dan penyesuaian jika diperlukan.
4. Kolaborasi dan Koordinasi: Tingkatkan kolaborasi dan koordinasi antarunit kerja di lingkungan BKPSDM. Jalin komunikasi yang baik, saling berbagi informasi, dan memanfaatkan sinergi untuk mencapai tujuan bersama dengan efektif.
5. Optimalisasi Penggunaan Teknologi: Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Pemanfaatan sistem informasi, aplikasi

digital, dan alat bantu teknologi lainnya dapat membantu mempercepat proses, memantau, dan melaporkan capaian hasil dengan lebih efisien.

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Setiap pejabat struktural dan PPTK bertanggung jawab untuk melaporkan secara berkala capaian program dan kegiatan yang mereka tangani. Pastikan laporan yang disusun akurat, lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya instruksi ini, seluruh pejabat struktural dan PPTK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan berkontribusi pada tercapainya tujuan strategis dan peningkatan kualitas pelayanan di BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.



Ditandatangani secara elektronik oleh ;
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. RAKHMADI, S.Sos.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

NOTA – DINAS

Kepada : Seluruh Pejabat Eselon III, IV dan PPTK di lingkungan
BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
Dari : Kepala BKPSDM
Tanggal : 15 Agustus 2023
Nomor : P-17/BKPSDM/000.7.2.10/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi untuk mengoptimalkan capaian target kinerja untuk
tahun 2023 dan tahun berikutnya

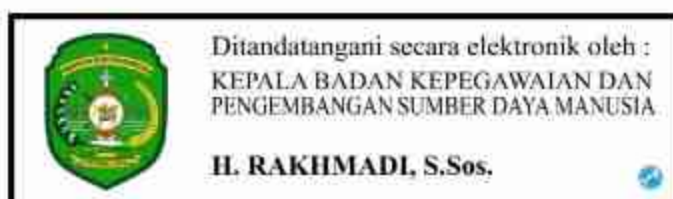
Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya, dengan ini disampaikan instruksi sebagai berikut:

1. **Analisis Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya** : Seluruh pejabat struktural dan PPTK diharapkan melakukan analisis mendalam terhadap capaian kinerja pada tahun sebelumnya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan hambatan-hambatan yang telah mempengaruhi capaian tersebut.
2. **Penetapan Target Kinerja yang Realistis** : Seluruh pejabat struktural dan PPTK diwajibkan untuk menetapkan target kinerja yang realistis dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. **Pengembangan Strategi Rencana Aksi** : Pejabat struktural dan PPTK harus merancang strategi rencana aksi yang jelas dan terarah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Strategi ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil, alokasi sumber daya yang diperlukan, serta penugasan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim..
4. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan** : Pejabat struktural dan PPTK harus menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan selama pelaksanaan program dan kegiatan, yang akan membantu dalam mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan mengambil tindakan korektif jika capaian kinerja tidak sesuai dengan rencana.

5. **Pemberdayaan Tim Pelaksana** : Berikan pelatihan dan pengembangan kepada tim pelaksana program dan kegiatan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif.
6. **Kolaborasi dan Kemitraan** : Setiap pejabat struktural dan PPTK bertanggung jawab menjalin kolaborasi dan kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta memperluas dampaknya.
7. **Inovasi dan Pengembangan** : Pejabat struktural dan PPTK harus mendorong tumbuhnya inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Ajak tim untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi dan pendekatan baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
8. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Setiap pejabat struktural dan PPTK harus memastikan transparansi dalam pelaporan capaian kinerja kepada semua pihak yang terkait, serta menetapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas tugas dan hasil kerjanya.

Diharapkan dengan adanya instruksi ini, seluruh pejabat struktural dan PPTK dapat mengoptimalkan capaian target kinerja tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Capaian kinerja yang optimal akan berkontribusi pada tercapainya tujuan strategis dan peningkatan kualitas pelayanan di BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

NOTA – DINAS

Kepada : Seluruh Pejabat Eselon III, IV dan PPTK di lingkungan
BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
Dari : Kepala BKPSDM
Tanggal : 16 Agustus 2023
Nomor : P-18/BKPSDM/000.7.2.10/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi untuk melaksanakan program/kegiatan secara efisien
dalam penggunaan anggaran

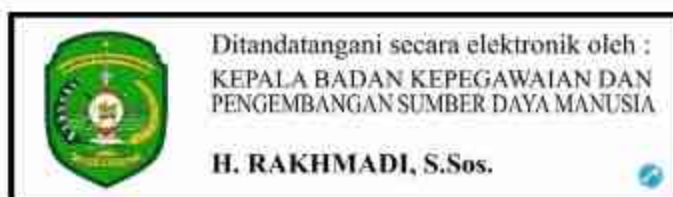
Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dengan efisien serta optimal dalam penggunaan anggaran di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini disampaikan instruksi sebagai berikut:

1. **Perencanaan yang Matang** : Seluruh pejabat struktural dan PPTK wajib memastikan setiap program dan kegiatan telah direncanakan dengan matang sebelum pelaksanaan dimulai, telah dilakukan identifikasi kebutuhan sumber daya secara detail, termasuk tenaga kerja, bahan, dan sarana-prasarana yang diperlukan.
2. **Penetapan Prioritas** : Seluruh pejabat struktural dan PPTK diwajibkan untuk menetapkan prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta fokus pada program yang memiliki dampak strategis dan signifikan terhadap tujuan BKPSDM dan pelayanan kepada masyarakat.
3. **Alokasi Anggaran yang Rasional** : Pejabat struktural dan PPTK harus mengalokasikan anggaran secara proporsional dan rasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing program dan kegiatan serta menghindari pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efektif.
4. **Pengawasan Pengeluaran** : Pejabat struktural dan PPTK harus melakukan pengawasan ketat terhadap pengeluaran selama pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

5. **Penggunaan Teknologi dan Inovasi** : Manfaatkan teknologi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk membantu membantu meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya.
6. **Optimalisasi Sumber Daya Internal** : Manfaatkan sumber daya internal, seperti tenaga kerja yang ada dalam organisasi, sebelum mempertimbangkan penggunaan sumber daya eksternal yang memerlukan biaya lebih tinggi.
7. **Kolaborasi antar Unit Kerja** : Pejabat struktural dan PPTK harus mendorong kolaborasi program dan kegiatan antar unit kerja di BKPSDM untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya secara bersama-sama serta menghindari kegiatan yang tumpang tindih dan duplikasi yang tidak perlu.
8. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala** : Pejabat struktural dan PPTK harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Identifikasi masalah yang muncul dan ambil tindakan korektif secara cepat jika diperlukan.
9. **Transparansi Pelaporan** : Laporan pelaksanaan program dan kegiatan harus disusun secara transparan dan akurat mengenai penggunaan anggaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi.
10. **Pendidikan dan Pelatihan** : Pastikan tim pelaksana telah mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.

Diharapkan dengan adanya instruksi ini, seluruh pejabat struktural dan PPTK dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

NOTA – DINAS

Kepada : Perencana Ahli Muda BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
Dari : Kepala BKPSDM
Tanggal : 23 Agustus 2023
Nomor : P-19/BKPSDM/000.7.5/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi untuk menyajikan data informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada LKjIP

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta mengukur pencapaian kinerja dengan lebih obyektif, dengan ini kami menginstruksikan Saudara untuk menyajikan data informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun. Langkah ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sejauh mana capaian kinerja instansi Anda serta memungkinkan adanya evaluasi berdasarkan standar yang lebih luas.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. RAKHMADI, S.Sos.